

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020



**BADAN HESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BONTANG
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena izin-Nya penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Tahun 2020 dapat di selesaikan. Dengan tersusunnya Renja ini, maka arah dan tujuan perjalanan Organisasi/Instansi, menjadi lebih jelas, sebagaimana tercermin pada Visi, Misi dan uraian lainnya. Kami menyadari tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu sambil berjalan kami mengharapkan saran dan pendapat untuk penyempurnaannya.

. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Kerja ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bontang,November 2019



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu agenda utama dalam siklus pelaksanaan pembangunan tahunan. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Penyusunan RKPD menjadi sangat strategis dalam menjamin sinergitas antara proses perencanaan dengan proses penyusunan anggaran. Sinkronisasi dan kesesuaian antara Program/kegiatan dalam RKPD, Renja Perangkat Daerah dan APBD sebagaimana amanat peraturan perundangan undangan dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang menggantikan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Badan Kesbangpol dalam amanat Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 dalam urusan pemerintahan umum kewenangan kepala pemerintahan mempunyai kepentingan untuk meningkatkan karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara, di dalam pelaksanaannya Bupati/ Walikota dibantu oleh instansi vertikal Kemendagri.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesbangpol Kota Bontang sebagai organisasi perangkat daerah pada Tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2020. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 yaitu **"TERWUJUDNYA STABILITAS KEAMANAN DAERAH KOTA BONTANG YANG DEMOKRATIS"**.

Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dasar perwujudan visi Pemerintah Kesbangpol untuk menjalankan rancangan program kegiatan selama lima tahun sehingga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dapat ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan KesbangpolKota BontangTahun 2020 adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ;
- d. Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- f. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 ;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- j. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025 ;
- k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis;
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050.12/7765/SJ tentang Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- m. Dokumen Reviu Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 s/d 2021 di Tahun 2019 Kota Bontang ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2020 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesbangpol Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah :

- 1. Acuan Badan Kesbangpol dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Kota Bontang Tahun 2020 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.
- 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kesbangpol Kota Bontang selama Tahun 2020.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika dan Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Skpd ..	10
2.4 Revie Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	15
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	15
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD	15
3.3. Program Dan Kegiatan	17
BAB IV PENUTUP	21

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1.** Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2.** Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3.** Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4.** Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5.** Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1.** Telaahan terhadap kebijakan Nasional.
- 3.2.** Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3.** Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kota Bontang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bontang selama tahun 2019 dan Pengukuran Capaian kinerja atas sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tujuan	Target	Realisasi	%
1	Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan	Persentase pembinaan terhadap masyarakat tentang ideologi negara dan wawasan kebangsaan	Persen	60	TW I	0	0	100
					TW II	0	0	100
					TW III	0	0	100

[BADAN KESBANGPOL KOTA BONTANG]

					TW IV	60	66.18	>100
		Persentase pembinaan forum kerukunan masyarakat	Persen	0.19	TW I	0	0	100
					TW II	0	0	100
					TW III	0	0	100
					TW IV	0.19	1.14	>100
2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat di daerah	Persen	40	TW I	0	0	100
					TW II	0	0	100
					TW III	0	0	100
					TW IV	40	51,76	>100
3	Peningkatan Peran Ormas Kota Bontang	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Persen	70.18	TW I	0	0	100
					TW II	0	0	100
					TW III	0	0	100
					TW IV	70.18	94.08	>100

Badan Kesbangpol sesuai Renstra yang dibuat telah menetapkan tiga sasaran strategis yang telah direalisasikan dalam 10 program kegiatan strategis dan rutin di tahun 2019. Program kegiatan strategis yaitu empat program diantaranya program pengembangan wawasan pembangunan, pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), dan pendidikan politik masyarakat .

Berdasarkan reviu hasil evaluasi pelaksanaan renstra perangkat daerah tahun lalu dan realiasasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah atau realisasi APBD, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
2. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peaturan Perundang-undangan
 - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
 - Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Adminisrasi/ Teknis Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan Pendidikan Pelatihan Formal dan Non Formal
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
 - Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Penyusunan Renja SKPD
 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas
 - Penyusunan Renstra SKPD
- f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Verifikasi Hibah
- g. Program Pengembangan Wawasan Pembangunan
- Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Orkemas
- h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Kegiatan Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
 - Kegiatan Pemberdayaan Forum Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
 - Kegiatan Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
 - Kegiatan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional
 - Kegiatan Memonitoring TKA
 - Kegiatan Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
 - Kegiatan Fasilitasi Bela Negara Bagi Orkemas
 - Kegiatan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- i. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota
- j. Program Pendidikan Politik
- Kegiatan Verifikasi Data Orkemas
 - Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Politik
 - Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan
 - Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu
 - Kegiatan Tim Peneliti Adm Kelengkapan Partai Politik
- k. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
- Tidak ada realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada realisasi anggaran
- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi targer kinerja program/kegiatan yaitu :
- Pada tahun 2019 program kinerja OPD Badan Kesbangpol tercapai.
 - Adanya kegiatan bersifat nasional yaitu kegiatan dukungan penyelenggaraan pemilu Pilpres dan Pilleg di tahun 2019.

- Pada Tahun 2019 dilakukan reviu renstra tahun 2016 – 2021 sehingga terdapat perubahan sasaran indikator kinerja.
 - Terdapat pengembangan atau penambahan bidang baru di struktur organisasi Badan Kesbangpol sehingga perlu menambahkan program dan kegiatan di Rencana kerja tahun 2020.
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah yaitu adanya kenaikan target kinerja perangkat daerah.
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah penambahan anggaran dan program kegiatan untuk pemenuhan sasaran strategis OPD.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan	Persentase pembinaan terhadap masyarakat tentang ideologi negara dan wawasan kebangsaan	Persen	60	66.18	>100
		Persentase pembinaan forum kerukunan masyarakat		0.19	1.14	>100
2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat di daerah	Persen	40	51,76	>100

3	Peningkatan Peran Ormas Kota Bontang	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Persen	70.18	94.08	>100
---	--------------------------------------	--	--------	-------	-------	------

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit organisasi. Berdasarkan Data diatas bahwa pada Sasaran Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2019 memuat sasaran strategis pada masing-masing bidang di Badan Kesbangpol yaitu Bidang Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi dan Bidang Bina Idiologi dan Politik.

Secara garis besar capaian realisasi pada indikator kinerja Badan Kesbangpol mencapai 100% bahkan capaiannya di posisi diatas 100%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesbangpol mencapai target sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dibuat dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Badan.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota di bidang Kesatuan Bangsa, demokrasi, Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Bontang memiliki peran penting dalam pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, karena dalam membangun tentunya sangat diperlukan suatu situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif, selain itu kesamaan pola pikir masyarakat yang bernilai kebangsaan yang kuat tentunya juga sangat diperlukan agar tercipta saling toleransi, menghargai dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Badan Kesbangpol merawat Kesatuan Bangsa melalui kepekaan dan cegah dini untuk membangun Demokrasi yang bermartabat dan elegan.

Letak wilayah Kota Bontang yang berada pada dataran rendah dan berawan, maka kerawanan akan munculnya bencana seperti banjir, longsor dan bencana alam lainnya perlu dipikirkan bersama guna percegahan dan penanggulangannya. Demikian pula halnya dengan realitas kehidupan Bangsa Indonesia dewasa ini yang masih dalam situasi kritis multi dimensional, kritis moneter dan ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah berkembang menjadi krisis sosial dan krisis politik yang

ditandai dengan terjadinya berbagai konflik horisontal maupun konflik vertical yang perlu mendapat perhatian dalam aspek Kesbangpol.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dan akar permasalahan pembangunan daerah yang secara umum dirasakan oleh masyarakat, maka permasalahan pembangunan di Kota Bontang – khususnya yang berkaitan dengan aspek Kesbangpol dapat diidentifikasi berdasarkan fakta atau kondisi aktual kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti :

- 1) Lunturnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kecenderungan terdapat pergeseran dalam nilai-nilai budaya Indonesia.
- 2) Keengganan dalam merefleksikan dan mengartikulasikan nilai-nilai luhur budaya dan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.
- 3) Euforia demokrasi secara berlebihan.
- 4) Masih minimnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, beretika dan bermoral bangsa dalam peran serta pembangunan.
- 5) Meningkatnya gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme dan sumber daya ekonomi.
- 6) Meningkatnya jumlah penyakit masyarakat akibat masuknya budaya dari luar dan kurangnya aturan secara tegas dalam pemberantasannya.
- 7) Rendahnya koordinasi antar pihak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul.
- 8) Belum optimalnya ormas, kelompok kepentingan dan partai politik menjalankan peran dan fungsi politik dalam masyarakat.
- 9) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga politik di daerah karena ketersediaan sumber daya belum sepenuhnya terdukung.
- 10) Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat antara lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran warga Negara tentang hak dan kewajiban warga Negara, kesadaran hukum dan pendidikan politik.
- 11) Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk pengembangan wawasan kebangsaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya komitmen ormas dan LSM tentang wawasan kebangsaan.
- 12) Belum optimalnya pendidikan politik sehingga partisipasi masyarakat terhadap politik rendah.
- 13) Perubahan nomenklatur pada OPD Badan Kesbangpol di Tahun 2019.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD.

Rancangan awal RKPD pada proses yang dilakukan yaitu total rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan di tahun 2020 berbanding lurus jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 3.861.737.519,- dimana memuat 11 program dan 38 kegiatan dengan 6 program kegiatan rutin sekretariat dan 5 program strategis Badan Kesbangpol.

Setelah ditentukan pagu indikatif untuk rencana kerja tahun 2020, terdapat perubahan pada nomenklatur struktur organisasi di Badan Kesbangpol diatur pada Peraturan Walikota no. 58 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019. Nama perubahan dan penambahan bidang di Badan Kesbangpol, yaitu adalah :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
4. Bidang Sekretariat.

Rencana Anggaran tahun 2020 akan menambahkan muatan penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan baru untuk mengakomodir kegiatan pada bidang baru.

Usulan Program dan Kegiatan Baru Tahun 2020

Badan Kesbangpol Kota Bontang

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program : Pembinaan dan	Bontang	Fasilitasi kegiatan	6 bulan	Penambahan Program

[BADAN KESBANGPOL KOTA BONTANG]

	Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Kegiatan : Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama		pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama		pada bidang
2	Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Kegiatan : Pentas Seni dan Budaya festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Bontang	Fasilitasi Forum Pembauran dalam keikutsertaan membuat pentas seni dan Budaya	16 etnis	Penambahan Kegiatan pada Bidang
3	Program : Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kegiatan : Fasilitasi Forkopimda di Daerah	Bontang	Pelaksanaan Kegiatan Forkopimda di Daerah	12 Bulan	Kebijakan Tingkat Nasional
4	Program : Kewaspadaan	Bontang	Pelaksanaan Kegiatan	12 Bulan	Penambahan Program dan

[BADAN KESBANGPOL KOTA BONTANG]

	Nasional dan Penanganan Konflik Kegiatan : Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Pemantauan di Lapangan		Kegiatan pada Bidang
5	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan Mobil Dinas	Bontang	Pengadaan Mobil Dinas	1 Buah	Penambahan Kegiatan pada Bidang
6	Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Aparatur Badan Kesbangpol	Bontang	Pelaksanaan peningkatan karakter Building	38 Orang	Penambahan Kegiatan pada Bidang
7	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Kantor	Bontang	Pengadaan Perlengkapan Kantor	4 Paket	Penambahan Kegiatan pada Bidang

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah tetap mengakomodir pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kebijakan yang tertuang pada pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi :

1. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
2. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dan
5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tindak lanjut untuk menjabarkan visi dan misi dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan memecahkan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Rumusan tujuan dinayatakan dalam bentuk kualitatif, sedangkan sasaran lebih bersifat kuantitatif dan terukur. Sehingga, sasaran dapat

digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan atau capaian pembangunan. Tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kota Bontang, berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan di atas, ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Misi Pertama

Badan Kesbangpol Kota Bontang.

V i s i:

“Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang Demokratis”

Misi 1	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Ketahanan dan Kewaspadaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Sosial Budaya	Meningkatkan Ketahanan dan Kewaspadaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Sosial Budaya	Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan

Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

Badan Kesbangpol Kota Bontang.

V i s i:

“Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang Demokratis”

Misi 2	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan kerukunan masyarakat	Memelihara kerukunan masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi

[BADAN KESBANGPOL KOTA BONTANG]

Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga

Badan Kesbangpol Kota Bontang.

V i s i:

“Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang Demokratis”

Misi 3	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan kehidupan demokrasi pancasila	Kualitas politik di Daerah	Peningkatan Peran Ormas Kota Bontang

Tujuan dan Sasaran Misi Keempat

Badan Kesbangpol Kota Bontang.

V i s i:

“Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang Demokratis”

Misi 4	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai dan aparatur profesional	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja Aparatur serta administrasi keuangan yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1) Meningkatnya Sarana dan Prasarana2) Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional3) Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pembangunan merupakan instrumen yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran

dan tujuan pembangunan, serta memperoleh alokasi anggaran atau merupakan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Program juga merupakan keterpaduan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil tertentu yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol Kota Bontang guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan .

Program yang menjadi kewenangan internal organisasi perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Bontang adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
- 6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 7) Program Pengembangan Wawasan Pembangunan
- 8) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 9) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- 10) Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 11) Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
- 12) Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- 13) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Selanjutnya kesebelas program tersebut diuraikan menjadi beberapa kegiatan SKPD Badan Kesbangpol Kota Bontang, sebagai berikut:

- (1) Pertemuan antar umat beragama
- (2) Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
- (3) Penyuluhan Hukum dan HAM
- (4) Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- (5) Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama
- (6) Penyuluhan tentang Wawasan Kebangsaan
- (7) Pemberdayaan Forum Komunitas Inteligen
- (8) Monitoring Keberadaan Orang Asing

- (9) Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan
- (10) Perayaan Hari-Hari Besar Nasional
- (11) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan
- (12) Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- (13) Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
- (14) Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila
- (15) Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota
- (16) Fasilitasi Forkopimda di Daerah
- (17) Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- (18) Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- (19) Sosialisasi tentang Organisasi Masyarakat
- (20) Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Orkemas
- (21) Fasilitasi Kegiatan Bela Negara
- (22) Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik
- (23) Verifikasi Data Orkemas
- (24) Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan/Gender
- (25) Fasilitasi Pendidikan Politik
- (26) Penyebarluasan Informasi Kesatuan Bangsa dan Politik
- (27) Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Keagamaan
- (28) Dukungan Penyelenggaraan Pemilu
- (29) Verifikasi Hibah
- (30) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- (31) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- (32) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- (33) Penyediaan Bahan Logistik kantor
- (34) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Tekhnis Perkantoran
- (35) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- (36) Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
- (37) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- (38) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- (39) Penyediaan Makanan dan Minuman
- (40) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- (41) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- (42) Pengadaan Mebeleur
- (43) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- (44) Pengadaan Sewa Gedung Kantor
- (45) Pengadaan Mobil Dinas
- (46) Pengadaan Perlengkapan Kantor
- (47) Peningkatan Kapasitas Aparatur
- (48) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- (49) Pendidikan dan Pelatihan Character Building
- (50) Pendidikan Pelatihan Formal dan Non Formal
- (51) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
- (52) Penyusunan Laporan Akhir Tahun
- (53) Penyusunan Renja SKPD
- (54) Penyusunan Laporan Akuntabilitas
- (55) Penyusunan Reviu Renstra SKPD
- (56) Penyusunan Renstra SKPD
- (57) dst

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang akan direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait, Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun 2020. Total Pagu Badan Kesbangpol untuk tahun 2020 sebesar Rp. 3.861.737.519,- dan prakiraan pagu di tahun 2021 sebesar Rp. 3.469.822.219,-.

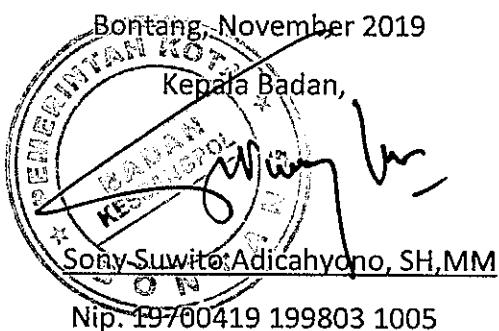
Prakiraan pagu pada rencana anggaran tahun 2020 dan tahun 2021 bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan di daerah adalah sebagai berikut.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kesbangpol Kota Bontang.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kota Bontang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Pemerintah Kota. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesbangpol Kota Bontang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kesbangpol Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.



REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KOTA BONTANG

UAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan			
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 0000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 0000)		
2	4	5	6	7	8	9	10	11		
RAM PELAYANAN ADMINISTRASI INTORAN			APBD 1.258.822.719,00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					APBD	1.226.790.019,00
:dian Surat Menyurat	Perangko, materai dan benda pos	300 buah	APBD 2.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Perangko, materai dan benda pos	500 buah	APBD	3.544.800,00	
:dian Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Listrik, Air dan Internet	1 Tahun	APBD 6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Listrik, Air dan Internet	1 Tahun	APBD	6.000.000,00	
:dian Jasa Pemeliharaan Perizinan Dinas/Operasional	KIR dan STNK	12 bulan	APBD 18.242.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	KIR dan STNK	17 Unit	APBD	18.242.500,00	
:dian Alat Tulis Kantor	ATK Kantor	12 Bulan	APBD 38.413.900,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	ATK Kantor	55 Jenis	APBD	44.101.400,00	
:dian Barang Cetakan dan Pengandaan	Barang cetakan dan Pengandaan	12 Bulan	APBD 24.830.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	SKPD	Barang cetakan dan Pengandaan	11 Jenis	APBD	24.830.000,00	
:ian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor	5 Unit	APBD 34.770.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Peralatan Kantor	5 Unit	APBD	34.770.000,00	
:dian Bahan Bacaan dan Peraturan Idang-undangan	Koran di OPD	12 bulan	APBD 16.896.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Koran di OPD	12 Bulan	APBD	16.896.000,00	
:dian Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor	1 Tahun	APBD 7.355.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Logistik kantor	1 Tahun	APBD	8.340.000,00	
:dian Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	APBD 60.282.500,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah kotak makanan dan snack	1970 kotak	APBD	60.282.500,00	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan			
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET CAPOIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPOIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)		
2	4	5	6	7	8	9	10	11		
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Meningkatnya Pengertahanan, Pemahaman Pegawai aerah	37 Orang	APBD	698.500.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	SKPD	Meningkatnya Pengertahanan, Pemahaman Pegawai	37 orang	APBD	659.000.000,00	
Jalan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	14 orang	APBD	350.782.819,00	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	SKPD	Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	14 orang	APBD	350.782.819,00	
RAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				APBD	193.330.000,00	
Iharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4	17 Kendaraan	APBD	169.530.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	17 Kendaraan	APBD	169.530.000,00
Iharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38 unit	APBD	23.800.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38 unit	APBD	23.800.000,00
RAM PENINGKATAN DISPLIN UR				PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR				APBD	30.320.000,00	
An Pakaiian Dinas Beserta apannya	Jumlah pakaiian yang disediakan	35 Steel	APBD	28.000.000,00	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaiian yang disediakan	37 steel	APBD	30.320.000,00
RAM PENINGKATAN KAPASITAS SERT DAYA APARATUR				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				APBD	44.000.000,00	
dikan dan Pelatihan Formal	Banyaknya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 pegawai	APBD	44.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD	Banyaknya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	APBD	44.000.000,00
RAM PENINGKATAN EMBANGAN SISTEM PELAPORAN IAN KINERJA DAN KEUANGAN				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				APBD	11.250.000,00	
Isunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	APBD	350.000,00	Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen	0 buah	APBD	0,00
Isunan Laporan Keuangan steran dan Prognosis Realisasi aran	Jumlah dokumen	2 dokumen	APBD	750.000,00	Penyelesaian Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	SKPD	Jumlah dokumen	2 dokumen	APBD	1.500.000,00

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan			
Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET CAPOIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPOIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)		
2 sunan Laporan Keuangan Akhir	4 Jumlah dokumen	5 1 dokumen	6 APBD 750.000,00	7 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD	8 Jumlah dokumen	9	10 APBD 1.500.000,00		
sunan Renja SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	APBD 750.000,00	Penyusunan Renja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	APBD 6.750.000,00		
sunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah dokumen	1 dokumen	APBD 350.000,00	Penyusunan Renstra SKPD	SKPD	Jumlah laporan Akuntabilitas	1 dokument	APBD 1.500.000,00		
RAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			APBD 3.175.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	SKPD	Penyelesaian laporan Akuntabilitas	1 dokument	APBD 3.175.000,00		
icas, Monitoring, dan Evaluasi Hibah Antuan Sosial Pemerintah Daerah	Proposal yang terverifikasi	30 Proposal	APBD 3.175.000,00	Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah	SKPD	Proposal yang terverifikasi	30 Proposal	APBD 3.175.000,00		
RAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			APBD 30.000.000,00	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD	Bontang City Carnival	1 kegiatan	APBD 30.000.000,00		
anaan Parmeran Pembangunan	Bontang City Carnival	1 kegiatan	APBD 30.000.000,00	Bontang City Carnival	SKPD	Bontang City Carnival	1 kegiatan	APBD 30.000.000,00		
RAM PENGEMBANGAN WAWASAN (GUNAN			APBD 117.650.000,00		SKPD			APBD 117.650.000,00		
Pembinaan dan Pemberdayaan si Kemasyarakatan dan Forum Iam/Paguyuban	Jumlah ormas yang dibina	ormas	APBD 117.650.000,00	Facilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Keagamaan/Paguyuban	SKPD	Jumlah ormas yang dibina	150 ormas	APBD 117.650.000,00		
RAM KEMITRAAN EMBANGAN WAWASAN NGSAAN			APBD 1.057.843.700,00	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	SKPD	Jumlah sekretariat forum keagamaan yang difasilitasi		APBD 1.068.090.000,00		
erdayaan Forum Kerukunan Antar Beragama (FKUB)	Jumlah sekretariat forum keagamaan yang difasilitasi	2 forum	APBD 182.476.700,00	Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Bergama (FKUB)	SKPD	Jumlah sekretariat forum keagamaan yang difasilitasi	2 forum	APBD 180.670.000,00		
erdayaan Forum Komunitas en Daerah (KOMINDA)	Jumlah rapat koordinasi Tim Koordinasi PKS	12 kali	APBD 146.652.000	Pemberdayaan Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	SKPD Koordinasi Kominda dan PKS	Koordinasi Kominda dan PKS	12 kali	APBD 0,00		

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan			
Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET CAPOAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPOAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 0000)		
Monitoring Keberadaan Orang Asing/TKA	4	5	6	APBD 7.070.000,00 Memonitoring Keberadaan Orang Asing/TKA	7	8	9	10		
erdayaan Forum Kewaspadaan Dini Fasilitasi Pemerdayaan FKDM	Jumlah sasaran lokasi monitoring	3 kec	APBD 7.070.000,00 Memonitoring Keberadaan Orang Asing/TKA	SKPD Jumlah sasaran lokasi monitoring	3 kec	APBD 7.000.000,00		11		
erdayaan Forum Kewaspadaan Dini Fasilitasi Pemerdayaan FKDM	1 Tahun	APBD 200.454.700,00	Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	SKPD Jumlah kegiatan FKDM yang di fasilitasi	4	APBD 209.670.000,00				
erdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Forum pembauran yang difasilitasi	14 etnis	APBD 251.358.700,00 Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	SKPD Jumlah forum pembauran yang difasilitasi	14 etnis	APBD 248.870.000,00				
aan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan	3 upacara	APBD 112.811.950,00 Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	SKPD Jumlah peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan	3	APBD 120.495.000,00				
asi Pusat Pendidikan Wawasan Igaean	Jumlah sekolah yang disosialisasikan	21 sekolah	APBD 85.668.200,00 Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	SKPD Jumlah sekolah yang disosialisasikan	21 sekolah	APBD 84.820.000,00				
asi Bela Negara Bagi Organisasi syarikatan	Jumlah Orkemas ikut pengembangan bela negara	orang	APBD 71.351.450,00 Fasilitasi Bela Negara Bagi Organisasi Kemasyarakatan	SKPD Jumlah peserta pelatihan bela negara	100 orang	APBD 70.645.000,00				
asi Tim Terpadu Penanganan Sosial	Jumlah kegiatan tim kewaspadaan dini yang difasilitasi	kegiatan	APBD 0,00 Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	SKPD Jumlah kegiatan tim kewaspadaan dini yang difasilitasi	1	APBD 145.920.000,00				
RAM PENINGKATAN TERANTASAN PENYAKIT 'ARAKAT(PEKAT)			APBD 267.594.450,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT(PEKAT)				APBD 264.945.000,00			
asi Kegiatan Badan Narkotika Kota	Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	12 bulan	APBD 267.594.450,00 Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota	SKPD Jumlah kegiatan Badan Narkotika yang difasilitasi	1	APBD 264.945.000,00				
RAM PENDIDIKAN POLITIK 'ARAKAT			APBD 858.371.650,00 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT				APBD 872.187.500,00			
eneliti Administrasi Kelengkapan Politik	Jumlah Proposal bantuan yang diverifikasi	parpol	APBD 11.615.000,00 Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik	SKPD Jumlah Proposal bantuan yang diverifikasi	10 kali	APBD 11.500.000,00				
kasi Data Orkemas	Jumlah lokasi Monitoring dan update Orkemas	orkemas	APBD 20.124.250,00 Verifikasi Data Orkemas	SKPD Jumlah verifikasi data orkesmas	6 kali	APBD 19.925.000,00				
gkatan Partisipasi Politik mpuan / Gender	Jumlah peserta yang mengikuti dialog	200 peserta	APBD 50.924.200,00 Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan / Gender	SKPD Jumlah peserta yang mengikuti dialog	200 orang	APBD 50.420.000,00				

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					
Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	
sasi Peraturan Tentang Organisasi masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	orang	APBD	36.859.950,00	Sosialisasi Tentang Organisasi Masyarakat	SKPD	Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	APBD
gan penyelenggaraan pemilu	Tahapan pemilu yang disedienggarakan	kegiatan	APBD	738.848.250,00	Dukungan penyelenggaraan pemilu	SKPD	Jumlah kegiatan dukungan pemilu yang diselenggarakan	3	APBD
TOTAL		3.861.737.519,00		TOTAL		3.861.737.519,00		3.861.737.519,00	